



**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER
(TRIWULAN IV)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.1254 Palembang
Telpon/Fax (0711) 314004
Email dp3asumsel@gmail.com
Website dpppa@sumselprov.go.id

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
a.	Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.	Tujuan;	2
2.	Sasaran;	2
3.	Belanja, Program APBD :	6
a)	Belanja Perangkat Daerah;	6
b)	Program dan Anggaran APBD;	6
4.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);	11
5.	Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).	14
b.	Latar Belakang Penyusunan Laporan	20
1.	Maksud;	20
2.	Tujuan.	20
II	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD SAMPAI BULAN JUNI TAHUN 2025	21
a.	Realisasi Belanja APBD	21
1.	Realisasi Total Belanja Daerah	21
2.	Realisasi Belanja Operasi	21
3.	Realisasi Belanja Modal	22
b.	Indikator Kinerja OPD	28
c.	Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah Tahun 2025	27
III	KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT	28
IV	PENUTUP	29

LAMPIRAN

Tabel Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2025

LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum OPD

Sesuai dengan **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dengan **6 (enam) sub urusan**, yaitu :

1. Kualitas Hidup Perempuan

Dengan kewenangan :

- a) **Pelebagaan** Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi.
- b) **Pemberdayaan perempuan** bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.

2. Perlindungan Perempuan

Dengan kewenangan :

- a) **Pencegahan kekerasan** terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- b) **Penyediaan layanan** rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinnasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.

3. Kualitas Keluarga

Dengan kewenangan :

- a) **Peningkatan** kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/ kota.
- b) **Penguatan dan pengembangan** LPLPKK (Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga) dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/ kota.
- c) **Penyediaan layanan** bagi keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/kota.

4. Sistem Data Gender dan Anak

Dengan kewenangan :

- a) **Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian** data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

5. Pemenuhan Hak Anak

Dengan kewenangan :

- a) **Pelembagaan** PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi.
- b) **Penguatan dan Pengembangan** lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

6. Perlindungan Khusus Anak

Dengan kewenangan :

- a) **Pencegahan** kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- b) **Penyediaan layanan** bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi.

- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

VISI SUMSEL Tahun 2025 – 2029

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

- Sumsel sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsiberdaya saing, modern, Tangguh, inovatif dan adil
- Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik.

MISI

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumberdaya yang berdayasaing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan rumah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu : **“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”** dengan mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu : **Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya yang berdaya saing**, dengan tujuan **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia** dan sasaran **Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak**.

TUJUAN DAN SASARAN DPPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Tujuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka menengah, sebagai berikut :

Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak

2. Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut ;

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
2. Meningkatkan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak
3. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak

3. BELANJA PROGRAM APBD

a. Belanja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 16.447.258.400,-
Belanja Operasi	: Rp. 13.936.758.400,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 7.187.823.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 6.748.935.400,-
Belanja Modal	: Rp. 2.510.500.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 110.500.000,-
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 2.400.000.000,-

b. Program dan anggaran APBD ;

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 22 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

iii.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

iv.Administrasi Umum Perangkat Daerah

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Fasilitas Kunjungan Tamu
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

v. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

vii. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

23. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

24. Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksana PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
- viii. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
25. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
26. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- ix. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
27. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
28. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
29. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 3) Program Perlindungan Perempuan
- x. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
30. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- xi. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
31. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

32. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- xii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
33. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
34. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Peningkatan kualitas Keluarga
 - xiii. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 35. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
 - xiv. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 36. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
 - xv. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 37. Pelaksanaan Penyediaan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - xvi. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

- 38. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- 39. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - xvii. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - 40. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - 41. Advokasi, Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - xviii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 42. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 43. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak
 - xix. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 44. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - 45. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - xx. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 46. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

47. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi

xxi. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

48. Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

49. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi

2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Indikator Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029, Indikator Kinerja Utama yaitu :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,465
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,93 – 93,99
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	57,12
Meningkatnya Pemenuhan dan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,00
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang di selesaikan	Persen	100

Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 yang menjadi tugas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2025 - 2029 yaitu:

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	57,12	57,30	57,50	58,00	58,50
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,465	0,453	0,441	0,428	0,416
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,93-93,99	93,99-94,10	94,07-94,18	94,13-94,21	94,19-94,29
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00

3. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

4. Kota Palembang
- Terdapat kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan provinsi
- Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang

memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

2) Kab. Muara enim

Kegiatan yang dilaksanakan di Kab Muara Enim, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

3) Kab. OKI

Kegiatan yang dilaksanakan di OKI, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

4) Kab. OKUT

Kegiatan yang dilaksanakan di OKUT, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

5) Kabupaten Lahat

Kegiatan yang dilaksanakan di Lahat, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

6) Kabupaten OKU Selatan

Kegiatan yang dilaksanakan di OKUS, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

7) Kabupaten Banyuasin

Kegiatan yang dilaksanakan di Banyuasin, antara lain sebagai berikut:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

8) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)

Kegiatan yang dilaksanakan di Muba, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

9) Kota Pagar Alam

Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Pagar Alam, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

10) Kota Prabumulih

Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Prabumulih, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

11) Kabupaten Ogan Ilir

Kegiatan yang dilaksanakan di OI, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

12) Kota Lubuk Linggau

Kegiatan yang dilaksanakan di Lubuk Linggau, antara lain sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

13) Kabupaten Empat Lawang

Kegiatan yang dilaksanakan di Empat Lawang, antara lain sbb:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

14) Kabupaten PALI

Kegiatan yang dilaksanakan di PALI, antara lain sbb:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

15) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)

Kegiatan yang dilaksanakan di Muratara, antara lain sbb:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

16) Kabupaten Musi Rawas

Kegiatan yang dilaksanakan di Musi Rawas, antara lain sbb:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

17) Kabupaten OKU

Kegiatan yang dilaksanakan di OKU, antara lain sbb:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

18) Luar Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan

i. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 027/SE/BAPPEDA/2018 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2018. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas serta terciptanya kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

ii. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah Povinsi Sumatera Selatan.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah.

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan Des	Realisasi s.d. Bulan Des	Target s.d. Bulan Des	Realisasi s.d. Bulan Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	16.447.258.400,-	14.851.267.793	100	90,30	100	100
Belanja Operasi	13.936.758.400,-	12.452.596.212,-	100	89,35	100	100
- Belanja Pegawai	7.187.823.000,-	6.421.585.760,-	100	89,34	100	100
- Belanja Barang dan Jasa	6.748.935.400,-	6.031.010.452,-	100	89,36	100	100
Belanja Modal	2.510.500.000,-	2.398.671.581,90,-	100	95,55	100	100
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.500.000,-	110.440.000,-	100	99,95	100	100
- Belanja Gedung dan Bangunan	2.400.000.000,-	2.288.230.981,90-	100	95,34	100	100

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp. **16.447.258.400,-** terealisasi sebesar Rp. **14.851.267.793,-** atau 90,30% dan realisasi fisik 100 %.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp.**13.936.758.400,-** terealisasi Rp. **12.452.596.212,-** atau 89,35% dan realisasi fisik 100 %, terdiri dari

- Belanja Pegawai Rp.7.187.823.000,- terealisasi Rp.6.421.585.760,- atau 89,34% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.748.935.400,- terealisasi Rp.6.031.010.452,- atau 89,36% dan realisasi fisik 100 %

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp.**2.510.500.000,-** terealisasi **Rp. 2.398.671.581,90,-** atau **95,55%** dan realisasi fisik 100%, terdiri dari

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp.110.500.000,- terealisasi Rp.110.440.000,- atau 99,95% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp.2.400.000.000,- terealisasi Rp. 2.288.230.981,90- atau 95,34% dan realisasi fisik 100 %

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Target Keuangan (%)	Realisasi		
					Keuangan		Fisik
					(Rp)	%	%
1	2	3	4	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,809,191,500		100.00	11,730,906,423	91.58	100.00
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000		100.00	14,675,000	97.83	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	Palembang	100.00	4,804,000	96.08	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	Palembang	100.00	9,871,000	98.71	100.00
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,921,475,000		100.00	7,101,475,736	89.65	98.80
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,187,823,000	Palembang	100.00	6,421,585,760	89.34	90.3
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	503,152,000	Palembang	100.00	462,781,000	91.98	100.00

5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197,000,000	Palembang	100.00	183,670,000	93.23	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,500,000	Palembang	100.00	33,438,976	99.82	100.00
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130,600,000		100.00	125,054,190	95.75	100.00
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000	Palembang	100.00	70,095,230	93.46	100.00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	55,600,000	Palembang	100.00	54,958,960	98.85	100.00
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	895,340,500		100.00	859,760,739	96.03	100.00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	Palembang	100.00	39,860,000	99.65	100.00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000	Palembang	100.00	100,000,000	100.00	100.00
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,500,000	Palembang	100.00	10,440,600	99.43	100.00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	Palembang	100.00	120,863,265	80.58	100.00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56,000,000	Palembang	100.00	55,903,000	99.83	100.00
14	Fasilitas Kunjungan Tamu	30,000,000	Palembang	100.00	24,598,000	81.99	100.00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508,840,500	Palembang	100.00	506,625,874	99.56	100.00
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676,000,000		100.00	614,318,688	90.88	100.00
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Palembang	100.00	8,000,000	80.00	100.00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280,000,000	Palembang	100.00	235,870,688	84.24	100.00
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000	Palembang	100.00	57,400,000	95.67	100.00
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326,000,000	Palembang	100.00	313,048,000	96.03	100.00
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,170,776,000		100.00	3,015,622,070	95.11	100.00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409,000,000	Palembang	100.00	374,633,389	91.60	100.00
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,776,000	Palembang	100.00	23,395,000	90.76	100.00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,736,000,000	Palembang	100.00	2,617,593,681	95.67	100.00
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,365,584,500		100.00	1,186,588,335	86.89	100.00
i	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	265,400,000		100.00	215,926,874	81.36	100.00

	Pemerintah Kewenangan Provinsi						
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	141,400,000	Palembang	100.00	134,911,167	95.41	100.00
24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	124,000,000	Palembang	100.00	81,015,707	65.34	100.00
ii	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	206,700,000		100.00	128,875,934	62.35	100.00
25	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	55,400,000	Palembang	100.00	46,179,240	83.36	100.00
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	151,300,000	Palembang	100.00	82,696,694	54.66	100.00
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	893,484,500		100.00	841,785,527	94.21	100.00
27	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	769,934,500	Palembang	100.00	738,664,811	95.94	100.00
28	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	100.00	45,228,566	90.46	100.00
29	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	73,550,000	Palembang	100.00	57,892,150	78.71	100.00
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	377,138,000		100.00	323,904,252	85.88	100.00
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65,440,000		100.00	64,140,000	98.01	100.00
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	65,440,000	Palembang	100.00	64,140,000	98.01	100.00
ii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192,390,000		100.00	143,441,860	74.56	100.00

31	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000	Palembang	100.00	70,493,162	88.12	100.00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	112,390,000	Palembang	100.00	72,948,698	64.91	100.00
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	119,308,000		100.00	116,322,392	97.50	100.00
33	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	86,837,000	Palembang	100.00	86,051,392	99.10	100.00
34	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,471,000	Palembang	100.00	30,271,000	93.22	100.00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	148,400,000		100.00	108,518,173	73.13	100.00
i	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	80,700,000		100.00	73,794,382	91.44	100.00
35	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	80,700,000	Palembang	100.00	73,794,382	91.44	100.00
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	22,700,000		100.00	7,060,000	31.10	100.00
36	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	22,700,000	Palembang	100.00	7,060,000	31.10	100.00
iii	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan HAK Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000		100.00	27,663,791	61.48	100.00
37	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	45,000,000	Palembang	100.00	27,663,791	61.48	100.00

	yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	205,200,000		100.00	184,878,408	90.10	100.00
i	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	205,200,000		100.00	184,878,408	90.10	100.00
38	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	116,486,000	Palembang	100.00	98,622,158	84.66	100.00
39	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	88,714,000	Palembang	100.00	86,256,250	97.23	100.00
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	410,660,000		100.00	391,041,061	95.22	100.00
i	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	120,640,000		100.00	114,675,445	95.06	100.00
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	61,200,000	Palembang	100.00	55,596,374	90.84	100.00
41	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	59,440,000	Palembang	100.00	59,079,071	99.39	100.00
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	290,020,000		100.00	276,365,616	95.29	100.00
42	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84,520,000	Palembang	100.00	78,320,006	92.66	100.00
43	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	205,500,000	Palembang	100.00	198,045,610	96.37	100.00
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,131,084,400		100.00	925,431,141	81.82	100.00
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137,000,000		100.00	128,090,250	93.50	100.00
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	87,000,000	Palembang	100.00	80,755,000	92.82	100.00

45	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	100.00	47,335,250	94.67	100.00
ii	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	301,322,000		100.00	197,861,900	65.66	70.00
46	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	100.00	38,093,000	76.19	84.00
47	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	251,322,000	Palembang	100.00	159,768,900	63.57	75.00
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	692,762,400		100.00	599,478,991	86.53	90
48	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	100.00	41,063,537	82.13	85.20
49	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	642,762,400	Palembang	100.00	558,415,454	86.88	90.00
	Jumlah	16,447,258,400		100.00	14,851,267,793	90.30	95

b. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang tercantum pada Renstra DPPPA Sumsel 2025-2029 :

Indikator Kinerja OPD

Capaian Indikator Renstra Per Desember Tahun 2025 :

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.465	0.479	97.08
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.93 - 93.99	93.87	99.94
Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	57.12	55.35	96.90

Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.00	61.9	96.72
Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	%	100	100	100.00
Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	%	100	100	100.00

c. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 belum ada Penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kebijakan/Peraturan tentang proses Penatausahaan Keuangan yang berubah/berganti
- Kesiapan PPTK untuk melaksanakan kegiatan belum maksimal
- Adanya Dokumen DPA yang harus direvisi
- Adanya kegiatan mendadak yang tidak terjadwal seperti panggilan acara di kementerian, rapat/pelatihan di provinsi

Tindaklanjut yang diperlukan :

- Koordinasi ke PPTK tentang jadwal kegiatan seluruh program kegiatan sehingga setiap PPTK dapat memperhitungkan pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan kondisi.
- Koordinasi dengan BPKAD mengenai kebijakan penatausahaan keuangan agar setiap proses sesuai dengan peraturan yang ada.
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders terkait dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Desember 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMATERA
SELATAN,

Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197306261993111001